

**PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI
INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)**



Oleh:
FADILA ARIESTA
2008 / 05336

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013
Wisuda Periode Maret 2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI
TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH**

(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)

Oleh :
FADILA ARIESTA
2008/05336

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2013 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2013

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 002

Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)

Fadila Ariesta

**Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : ariestafadila@yahoo.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji : (1) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan. (2) Pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatanwaktuan. (3) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan. (4) Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatanwaktuan. (5) Pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan. Jenis penelitian ini digolongkan penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 38 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling. Metode pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data dengan menggunakan regresi berganda dengan uji t.

Hasil dari penelitian ini adalah pada pengujian pertama didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa kualitas sumberdaya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan.

Bagi instansi pemerintahan diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas kerjanya dalam hal pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki serta didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai agar menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan.

Kata kunci : Keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan

Abstract

The purpose of this research is (1) the influences of the quality human resources to the reliability, (2) the influences of the quality human resources to the timeliress, (3) the influences of the use of information technology to the reliability, (4) the influences of the use of information technology to the timeliress, (5) the influences of the controlling intern accountancy to the reliability. This research is causative research. The population of this research is accountancy/ clerical of financial in SKPD kabupaten Pasaman Barat that are amounted to 38 SKPD. This research used total sampling method to taking the sample. The method of collecting the data is using questioner. The methods of analysis of the data are using divide regression with testing t.

The results of this study is the first test showed that the quality human resources, used of information technology, and controlling intern accountancy significantly influence the reliability. In the second test showed that the quality human resources and used of information technology significantly influence the timeliness.

For the government agency can be improved the quality of credibility on financial organizing with utilization of information technology be optimum and controlling intern accountancy design availability which are produce financial region government reported with high value that is reliability and timeliress.

Key words : Reliability and timeliress of financial reporting

1. Pendahuluan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, telah mendorong pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006)

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaran pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, upaya untuk meujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai (Suwardjono,2005). Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan andal. Oleh karena itu, pemerintah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.

Kebermanfaatan merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Oleh karena itu, kriteria ini secara umum disebut dengan karakteristik kualitatif atau kualitas informasi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana disebutkan dalam Kerangka

Konseptual Akuntansi Pemerintahan terdiri dari: (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, (4) dapat dipahami.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah kabupaten/ kota di Sumbar 2010 ternyata belum ada perbaikan dibandingkan tahun 2009, sehingga hasil penilaian oleh BPK masih tetap memberikan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kesalahan yang ditemukan tim BPK sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu masih ada juga perjalanan dinas fiktif. Misalnya ada tiket dan agenda perjalanan, tapi kenyataannya tidak. Kesalahan lainnya yaitu kesalahan penganggaran belanja, misalnya belanja modal dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Kemudian kesalahan inventaris/ revaluasi aset terutama yang tidak masuk kelompok aset tetap, pengelolaan dan penatausahaan persediaan (Padang, Haluan. 2011).

Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selama tujuh tahun berturut-turut memperoleh opini *disclaimer*. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat berupaya memperbaiki opini *disclaimer* yang diperoleh pada LKPD tahun sebelumnya, terbukti LKPD Kabupaten Pasaman Barat mampu memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk LKPD tahun 2010 dan 2011. Meski demikian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tetap berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menyusun LKPD sesuai dengan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, guna meningkatkan kualitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menjadi target Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Keterlambatan pencairan dana disebabkan adanya kelambanan dalam membuat laporan penggunaan anggaran. Kebanyakan dinas, badan, kantor dan bagian di Kabupateb Pasaman Barat membuat laporan keuangan pada akhir tahun, yang mengakibatkan pencairan dana terlambat dan mengganggu program yang ada (koranpadang.com.2011).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum seluruhnya memenuhi kriteria keterandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat keterandalan dan ketepatanwaktuan informasi laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak. Menurut Suwardjono, 2005, keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Sedangkan ketepatanwaktuan adalah tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Hal pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumberdaya manusia. Menurut Wahyono (2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Sumberdaya manusia yang pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumberdaya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatanwaktuan).

Saat ini secara bertahap pemerintah berpindah meninggalkan sistem akuntansi *single entry* menjadi *double entry* karena penggunaan *single entry* tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Basis akuntansi yang diterapkan pun mengalami perubahan dari basis kas (*cash basis*) ke basis akrual (*accrual basis*). Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar

masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Oleh karena itu diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bernilai informasi.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Seperti kita ketahui bahwa total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Dari sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan bahwa volume transaksi keuangan pemerintah juga menunjukkan kuantitas yang semakin besar dan kualitas yang semakin rumit dan kompleks. Peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah. Untuk itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meng-embangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah.

Menurut Jogiyanto (1995:41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatanwaktuan) dapat dicapai

dengan peran komponen teknologi. Menurut Jogiyanto (1995:18) informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Widjajanto 2001:89).

Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Akan tetapi selain sumberdaya manusia dan teknologi informasi tersebut ada hal penting lain yang harus diperhatikan yaitu pengendalian intern akuntansi. Pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur tehnik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Fungsi pengendalian intern tersebut dapat membantu sumber daya manusia untuk mengetahui batasan-batasan dan hak-hak dalam bekerja serta teknologi informasi seperti apa yang bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Se jauhmana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
2. Se jauhmana pengaruh kualitas sumberdaya manusia terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintahan daerah?
3. Se jauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

4. Se jauhmana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

5. Se jauhmana pengaruh pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintahan daerah?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak:

1. Bagi Penulis, Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta akan memberikan pengalaman dalam pengembangan kemampuan ilmiah khususnya pada penelitian tentang Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
2. Bagi Akademisi, Memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian- penelitian selanjutnya.
3. Bidang Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna mengembangkan literatur ilmu akuntansi
4. Bagi Pemerintah Daerah, Memberikan masukan yang berguna agar dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kajian Teori, Kerangka Konseptual Dan Hipotesis

Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut suwardjono (2005) pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam Statement Offinancial Accounting Concepts mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi

keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui statement keuangan.

Nilai Informasi

Menurut Suwardjono (2005:111) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005:165) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) :

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna

untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

- c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
 3. Dapat dibandingkan, Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Widodo, 2001 dalam Arfianti, 2011).

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumberdaya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumberdaya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jugiyanto (12:1995) pemanfaatan adalah perilaku karyawan teknologi dalam tugasnya, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dalam diversitas aplikasi yang dijalankan. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan dan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Jugiyanto (1995:7) bahwa aplikasi teknologi sangat berperan dalam pengelolaan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen.

Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu: (a) keterandalan pelaporan keuangan, (b) efisiensi dan efektivitas operasi, dan (c) kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan pengendalian intern akuntansi, sedangkan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif.

Penelitian Terdahulu.

Arfianti (2011) melakukan penelitian tentang “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum” (Studi Pada Blu Di Kota Semarang). Variabel independen yang digunakan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi. Variabel Dependen yang digunakan adalah Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Dan *Timeliness* Pelaporan Keuangan.

Harifan (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Peme-

rintah Daerah”. Dengan variabel independen antara lain Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi, sedangkan variabel dependen adalah Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Sumber daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Indriasari (2008) meneliti tentang “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)”. Variabel independen yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kapasitas sumberdaya manusia tidak memiliki pengaruh. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan kapasitas sumberdaya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Winidyaningrum (2010) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Sumberdaya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)”. Variabel independen yang digunakan adalah sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, dengan pengendalian intern akuntansi sebagai variabel intervening. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah

keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui pengendalian intern akuntansi. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan sumberdaya manusia tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kualitas SumberDaya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi, dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, diantaranya adalah keterandalan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H1 : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Kualitas SumberDaya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan

belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatan-waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kualitas sumber daya manusia dengan ketepatan-waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H2 : Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap ketepatan-waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Penelitian yang berhubungan dengan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi pada organisasi sektor publik menunjukkan bahwa pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multi-processing* (Indriasari, 2008). Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi dengan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H3 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatan-waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, Manfaat lain yang ditawarkan dalam pemanfaatan teknologi informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi. Sistem akuntansi di Pemerintah Daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan-waktu.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan-waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H4 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan-waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Masih ditemukannya penyimpangan dan kebocoran di dalam laporan keuangan oleh BPK, menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum memenuhi karakteristik/ nilai informasi yang disyaratkan, yaitu keterandalan. Hasil evaluasi pemeriksaan oleh BPK menunjukkan bahwa masih terdapat LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar dan memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

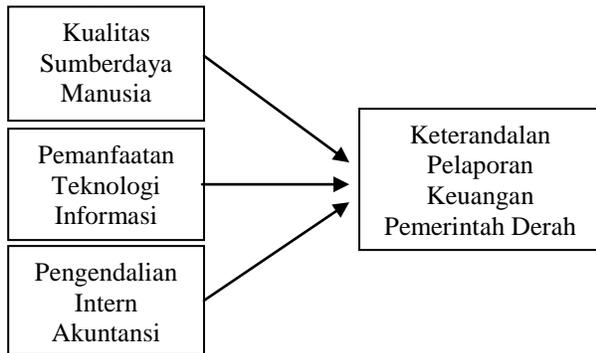
Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern akuntansi dengan keterandalan pelaporan

keuangan pemerintah daerah, sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan :

H5 : Pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

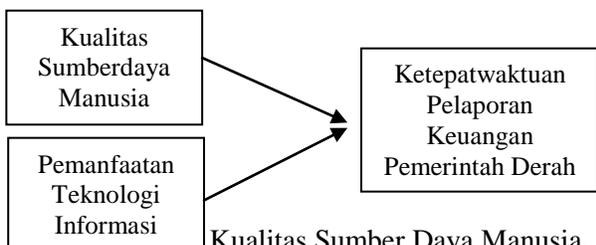
Gambar
Kerangka Konseptual

Model I



Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern akuntansi, terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Model I



Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan penelitian Kausatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan SKPD di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan metode total sampling dikarenakan populasinya kurang dari 100 subjek. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf sub bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan. Jenis data yang di pakai adalah data Subjek. Sumber data

adalah data Primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data yaitu dengan penyebaran kuesioner.

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Uji asumsi klasik terdiri dari uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda, Uji F, Uji koefisien determinasi, dan Uji t.

Definisi Operasional

Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah kemampuan sumberdaya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah manfaat yang diharapkan oleh pengguna teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya.

Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern akuntansi adalah bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data akuntansi.

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan

Nilai informasi pelaporan Keuangan adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected item-Total Colleration*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N=64$ adalah 0,2075. Sedangkan untuk uji reabilitasnya dapat dinyatakan reliabel jika

mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing instrumen yang dikatakan valid lebih besar dari 0,6 menurut Ghazali (2007: 42).

Dari Tabel dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen: Untuk instrumen Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah nilai terkecil 0,547, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah nilai terkecil 0,265, Kualitas Sumberdaya Manusia nilai terkecil 0,210, Pemanfaatan Teknologi Informasi nilai terkecil 0,357, dan Pengendalian Intern Akuntansi nilai terkecil 0,227.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana hasil penelitian tetap konsisten. Keandalan konsistensi antar item atau koefisien keandalan *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel di atas yaitu instrumen variabel Untuk instrumen Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah nilai terkecil 0,871, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Daerah nilai terkecil 0,922, Kualitas Sumberdaya Manusia nilai terkecil 0,766, Pemanfaatan Teknologi Informasi nilai terkecil 0,756, dan Pengendalian Intern Akuntansi nilai terkecil 0,864. Dengan demikian semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel. Dengan kriteria keandalan diatas 0,7–0,8 dapat dikatakan baik.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel dari *kolmogorov smirnov* $> 0,05$, yaitu 0,525. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance value* $> 0,10$. Berdasarkan pengolahan data, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan *Tolerance*. Masing-masing

variabel bebas tersebut memiliki nilai $VIF < 10$ dan *Tolerance* $> 0,10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas digunakan uji *gleysen*. Pada uji ini apabila hasilnya $sig > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat dilihat tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heterokedastisitas.

Uji Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi bertujuan untuk melihat seberapa kuat model yang dihasilkan dari variabel penelitian ini. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu: Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap variabel terikat yaitu Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 57,8% sedangkan 42,2% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Dan kontribusi variabel bebas yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel terikat yaitu Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 14,2% sedangkan 85,8% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti

2. Analisis Regresi berganda

Analisis regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan α yang diajukan yaitu 95% atau $\alpha = 0,05$.

Model I

$$Y = 0,774 + 0,080X_1 + 0,180X_2 + 0,399X_3 + e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

a. Nilai konstanta sebesar 0,774 mengindikasikan bahwa jika variabel independen

- yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi adalah nol (0) maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar konstanta 0,774.
- Koefisien kualitas sumber daya manusia sebesar 0,080 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumberdaya manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,080 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
 - Koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,180 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan mengakibatkan peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,180 dengan asumsi variabel lain konstan.
 - Koefisien pengendalian intern akuntansi sebesar 0,399 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pengendalian intern akuntansi, maka akan mengakibatkan peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,399 dengan asumsi variabel lain konstan.

Model II

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y=23,011+0,264X_1+0,283X_2+e$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

- Nilai konstanta sebesar 23,011 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi adalah nol (0) maka Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebesar konstanta 23,011.
- Koefisien kualitas sumber daya manusia sebesar 0,264 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia satu satuan akan mengakibatkan peningkatan keterandalan pelaporan keua-

- ngan pemerintah daerah sebesar 0,264 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- Koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,283 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pemanfaatan teknologi informasi, maka akan mengakibatkan peningkatan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,283 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah fix atau tidak. Berdasarkan Tabel 19 nilai sig 0,000 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, berarti model fix digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis

1. Hipotesis 1

Pengujian hipotesis1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< \alpha$ 0,05. Nilai t_{tabel} pada α 0,05 adalah 1,672. Untuk variabel Kualitas Sumberdaya Manusia nilai t_{hitung} adalah 2,382 dan nilai sig adalah 0,020. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,382 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,020 < \alpha$ 0,05. Nilai koefisien β dari variabel kualitas sumber daya manusia bernilai positif yaitu 0,080. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

2. Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 1,672. Untuk variabel Kualitas Sumber Daya Manusia nilai t_{hitung} adalah 2,187 dan nilai sig adalah 0,033. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,187 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,033 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel kualitas sumber daya manusia bernilai positif yaitu 0,264. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis 2 dari penelitian ini diterima.

3. Hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 1,672. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi nilai t_{hitung} adalah 2,339 dan nilai sig adalah 0,023. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,339 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,023 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif yaitu 0,180. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis 3 dari penelitian ini diterima.

4. Hipotesis 4

Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 1,672. Untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi nilai t_{hitung} adalah 2,278 dan nilai sig adalah 0,026. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,278 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,026 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β

dari variabel pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif yaitu 0,283. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis 4 dari penelitian ini diterima.

5. Hipotesis 5

Pengujian hipotesis 5 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha 0,05$ adalah 1,672. Untuk variabel pengendalian intern akuntansi nilai t_{hitung} adalah 5,486 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5,486 > 1,672$ atau nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel pengendalian intern akuntansi bernilai positif yaitu 0,399. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan bahwa variabel pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sehingga hipotesis 5 dari penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumberdaya manusia dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah mempunyai hubungan positif, semakin baik kualitas sumberdaya manusia, semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berpengaruhnya kualitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sama dengan teori yang dinyatakan oleh Wahyono

(2004:12) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (keterandalan), disini menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan dan sumberdaya yang menghasilkannya. Dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang bernilai keterandalan adalah dengan adanya sumberdaya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi. Keahlian ini dapat dicapai dengan adanya kemauan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan dibidang akuntansi.

2. Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kedua (H_2) disimpulkan bahwa kualitas sumberdaya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dinyatakan oleh Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa Sumberdaya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumberdaya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan. Keterlambatan penyajian laporan keuangan berarti bahwa laporan keuangan belum atau tidak memenuhi salah satu nilai informasi yang disyaratkan, yaitu ketepatanwaktuan.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ketiga (H_3) disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik salah satunya adalah dengan menghasilkan laporan keuangan yang berbasis teknologi informasi.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis keempat (H_4) disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sama dengan teori yang dikemukakan oleh Jogiyanto (1995) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Komponen teknologi sistem komputer mempercepat proses transmisi data yang mana akan mendukung penciptaan proses nilai informasi.

Menurut Jogiyanto (1995) informasi merupakan proses dari sistem teknologi informasi. Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita pemerintah dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang kriteria kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat dalam pengambilan keputusan oleh semua pengguna dan stakeholder.

5. Pengaruh Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis kelima (H_5) disimpulkan bahwa pengendalian intern akuntansi informasi mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wahyono (2004) Untuk mencapai informasi yang akurat diperlukan komponen pengendalian atau kontrol. Komponen kontrol atau pengendalian akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Dengan adanya komponen kontrol dapat menunjang informasi menghasilkan informasi yang bernilai. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kriteria nilai informasi keterandalan tidak dapat dipisahkan dari aspek atau lingkungan pengendalian.

5. Penutup

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumberdaya manusia maka semakin andal pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Kualitas sumberdaya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumberdaya manusia maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik pula.
3. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah . Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pemanfaatan teknologi informasi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.
4. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik Pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.
5. Pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian

intern akuntansi maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Untuk peneliti selanjutnya, supaya dapat melengkapi metode survei penelitian ini dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti sempat mewawancarai beberapa responden dan menemukan adanya perbedaan antara jawaban dikuesioner dan jawaban secara lisan untuk pertanyaan/pernyataan yang sama, peneliti berikutnya juga dapat mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, peneliti berikutnya agar memperluas cakupan penelitian, misalnya kabupaten dan kota lain di luar Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat sehingga bisa terlihat aspek nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Bagi Instansi pemerintahan diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas kinerjanya dalam hal pengelolaan keuangan dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki baik pada tingkatan sistem, kelembagaan maupun individu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan adanya rancangan pengendalian intern akuntansi yang memadai diharapkan pihak pengelola keuangan daerah khususnya bagian akuntansi mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya akan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang bernilai yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan, serta ber-

manfaat sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aren, A. Alvin. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi Kedua Belas. Jakarta : Erlangga.
- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan: Telaah kritis PP Nomor 24 Tahun 2004*. BPFE, Yogyakarta
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). 1999. *Concepts Statement No.1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Board Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion and Analysis For State and Local Government*. Norwalk
- Harifan, Handriko. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah, Padang. *Skripsi Program S1, Universitas Negeri Padang*.
- Havesi, G. Alan. 2005. *Standars for Internal Control in New York State Government* .www.osc.state.ny.us.
- Indriasari, Desi. 2008. "Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi

- Pelaporan Keuangan Daerah”. Pontianak : *jurnal SNA*.
- Jugiyanto, HM. 1995. *Analisis dan Desain System Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis*. Andi Offies. Yogyakarta
- Jurnali, Teddy & Bambang Supomo. 2002. “Pengaruh Faktor- Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol 5 No.2 Hal.214
- Koran-padang. 2011. “BPK nilai laporan keuangan Pasbar WDP”. (koran-padang.com)
- Mardiasmo. 2006. Perwaju dan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No.1, Hal 1-17.
- Mahmudi. 2007. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. UPP STIM YKPN.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen : Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Padang Haluan. 2011. “ Hasil Audit LKPD di Sumbar”.
- Pemerintahan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- , Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Negara.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Wahana Komputer. 2003. *Panduan Aplikatif Sistem Akuntansi Online Berbasis Komputer*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004. *Sistem Informasi Akuntansi : Analisis, Desain dan Pemograman Komputer*. Yogyakarta : Andi.

- Winidyaningrum, Celviana. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi, Semarang. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Widjajanto, Nuroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval& Bernard Wong-On-Wing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons.Inc.

KUESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden :(diidi oleh peneliti)
Nama :
Jenis Kelamin : Laki- laki Perempuan
Umur :
Pendidikan Terakhir : SMA D₃
 S₁ S₂
Masa Kerja : <5 tahun 5-10 tahun >10 tahun
Nama SKPD :

PETUNJUK PENGISIAN

Penulis mengharapkan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan kondisi tempat Bapak atau Ibu bekerja dengan member tanda ceklis (√) pada table yang sudah tersedia dengan memilih :

SS	= Sangat Setuju	SL	= Selalu
S	= Setuju	S	= Sering
R	= Ragu	K	= Kadang- kadang
TS	= Tidak Setuji	J	= Jarang
STS	= Sangat Tidak Setuju	TP	= Tidak Pernah

DAFTAR PERTANYAAN

1. KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Subbagian keuangan/ akuntansi memiliki staf yang berkualitas dalam jumlah yang cukup					
2	Minimal staf subbagian keuangan/ akuntansi merupakan lulusan D ₃ akuntansi atau lebih tinggi.					
3	Subbagian keuangan/ akuntansi memiliki uraian peran dan fungsi yang jelas.					
4	Peran dan tanggung jawab seluruh pegawai subbagian keuangan/ akuntansi ditetapkan secara jelas dalam peraturan daerah.					
5	Uraian tugas subbagian keuangan/ akuntansi sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya.					
6	Terdapat pedoman mengenai prosedur dan proses akuntansi.					
7	Subbagian keuangan/ akuntansi telah melaksanakan proses akuntansi.					

8	Sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki sumber daya pendukung operasional yang cukup.					
9	Pelatihan-pelatihan dilakukan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian dalam tugas.					
10	Dana- dana dianggarkan untuk memperoleh sumber daya, peralatan, pelatihan yang dibutuhkan.					

2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

No	Pertanyaan	SL	S	K	J	TP
1	Dalam melaksanakan tugas subbagian akuntansi/ keuangan memiliki komputer yang cukup.					
2	Jaringan internet terpasang di unit kerja secara <i>Local Area Networt (LAN) atau Wide Area Networt (WAN)</i> .					
3	Jaringan internet terpasang dan dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
5	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
7	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
8	Peralatan yang usang/ rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					

3. PEGENDALIAN INTERN AKUNTANSI

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Subbagian keuangan/ akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi:					
	a. Prosedur akuntansi penerimaan kas					
	b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas					
	c. Prosedur akuntansi aset					
	d. Prosedur akuntansi selain kas					
2	Daftar rekening (<i>chart of account</i>) pemerintah daerah tersedia dan digunakan.					
3	Transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang					
4	Setiap transaksi yang terjadi harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah.					
5	Setiap transaksi dicatat dalam buku catatan akuntansi.					
6	Catatan akuntansi dijaga untuk tetap "up-to-date".					
7	Laporan-laporan keuangan direview dan disetujui terlebih dahulu oleh kepala sub bagian keuangan/ akuntansi sebelum					

	didistribusikan					
8	Sistem akuntansi yang ada memungkinkan <i>audit</i>					
9	Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.					

4. NILAI INFORMASI

A. KETERANDALAN

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan.					
2	Neraca disajikan.					
3	Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD disajikan.					
4	Catatan atas laporan keuangan disajikan.					
5	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji.					
6	Rekonsiliasi dilakukan secara periodik antara catatan akuntansi dengan catatan bank					
7	Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.					

B. KETEPATWAKTUAN

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
1	Informasi yang dibutuhkan segera tersedia ketika diminta.					
2	Laporan-laporan berikut disediakan secara sistematis dan teratur					
	a. Laporan Harian					
	b. Laporan Mingguan					
	c. Laporan Bulanan					
	d. Laporan Semester					
	e. Laporan Tahunan					
3	Laporan-laporan berikut disampaikan secara sistematis dan teratur					
	a. Laporan realisasi semester pertama					
	b. Laporan realisasi anggaran atau laporan perhitungan APBD					
	c. Neraca					
	d. Catatan atas Laporan Keuangan					

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS MODEL I

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{ab}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.93529078
Most Extreme Differences	Absolute	.113
	Positive	.078
	Negative	-.113
Kolmogorov-Smirnov Z		.908
Asymp. Sig. (2-tailed)		.382

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

MODEL II

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{ab}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.18553686
Most Extreme Differences	Absolute	.132
	Positive	.132
	Negative	-.092
Kolmogorov-Smirnov Z		1.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.214

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

2. UJI HETEROSKEDASTISITAS MODEL I

Coefficient^s

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.850	2.259		-.819	.416
	X1	-.022	.023	-.128	-.961	.340
	X2	.094	.053	.249	1.772	.082
	X3	.021	.050	.062	.414	.680

- a. Dependent Variable: AbsUt

MODEL II

Coefficient^s

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.850	3.134		2.824	.006
	X1	-.113	.066	-.218	-1.716	.091
	X2	-.027	.068	-.051	-.402	.689

- a. Dependent Variable: AbsUt

3. UJI MULTIKOLINEARITAS MODEL I

Coefficient^s

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.774	3.284		.236	.814		
	X1	.080	.033	.210	2.382	.020	.858	1.165
	X2	.180	.077	.218	2.339	.023	.772	1.295
	X3	.399	.073	.546	5.486	.000	.676	1.480

- a. Dependent Variable: Y1

MODEL II

Coefficient^s

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	23.011	5.751		4.001	.000		
	X1	.264	.121	.260	2.187	.033	.962	1.039
	X2	.283	.124	.271	2.278	.026	.962	1.039

- a. Dependent Variable: Y2

Uji F

1. MODEL I

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	351.793	3	117.264	29.818	.000 ^a
	Residual	235.957	60	3.933		
	Total	587.750	63			

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y1

2. MODEL II

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	224.071	2	112.035	6.192	.004 ^a
	Residual	1103.679	61	18.093		
	Total	1327.750	63			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y2

Uji t

1. MODEL I

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.774	3.284		.236	.814
	X1	.080	.033	.210	2.382	.020
	X2	.180	.077	.218	2.339	.023
	X3	.399	.073	.546	5.486	.000

a. Dependent Variable: Y1

2. MODEL II

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.011	5.751		4.001	.000
	X1	.264	.121	.260	2.187	.033
	X2	.283	.124	.271	2.278	.026

a. Dependent Variable: Y2